



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN PLT DIREKTUR UTAMA PT PLN (PERSERO)**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 5 (lima)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Plt Dirut PT PLN (Persero)
Hari, tanggal	: Senin, 25 November 2019
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Progres Pembangunan pembangkit listrik 35 GW dan Transmisi 2. Rencana Program Kerja 2020 3. Laporan PLN terkait Tindak Lanjut Pemadaman listrik, Agustus 2019 4. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 31 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 4 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 25 November 2019 dibuka pukul 13.15 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Progres Pembangunan pembangkit listrik 35 GW dan Transmisi
  - b. Rencana Program Kerja 2020
  - c. Laporan PLN terkait Tindak Lanjut Pemadaman listrik, Agustus 2019
  - d. Lain-lain Ketua Rapat menginformasikan bahwa
  
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan secara detil dan komprehensif dari Saudara Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) mengenai pokok-pokok permasalahan terkait sistem ketenagalistrikan, diantaranya:
  - a. Progres realisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan progres pelaksanaan program 35 ribu MW hingga kuartal III Tahun 2019
  - b. Peta rasio elektrifikasi PLN per Provinsi hingga kuartal III Tahun 2019
  - c. Strategi dan prioritas pelaksanaan program kerja dan investasi tahun 2020.
  - d. Penjelasan mengenai pemadaman listrik se-Jawa pada bulan Agustus 2019
  - e. Penjelasan tentang kondisi sistem besar saat beban puncak di tahun 2019
  
4. Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan, bahwa:
  - a. Progres Pembangunan pembangkit listrik 35 GW dan Transmisi  
Secara total Kapasitas 35.516 MW dengan rincian sebagai berikut:
    - Beroperasi 3,946 atau 11%
    - Kontruksi 23,129.8 atau 65%
    - Financial Clocing 6,877.6 atau 20%
    - Pengadaan 829 atau 2%
    - Perencanaan 734 atau 2%
 Progres Pembangunan Transmisi 47.646 kms dan Gardu Induk sebesar 115.774 MVA
  - b. Rencana Program Kerja 2020
    - 1) Asumsi RKAP 2020

Keterangan	Satuan	2019 RKAP	2019 Prognosa	2020 Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi	%	5.3	5.3	5.3
Inflasi	%	3.5	3.1	3.1
Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15,000	13,250	14,400

Harga ICP/Barrel	US\$	70	63	63
Pertumbuhan Penjualan	%	7.01	4.55	5.30
Volume Penjualan	TWh	251.1	245.3	258.3
Harga Batubara	US\$/ton	70	70	79.5
Harga Gas	US\$/M MBTU	8.81	8.81	9.15
Alokasi Kas Subsidi	Rp.Tn	57.1	54.8	54.7
Harga jual Rata-rata	Rp/kWh	1.126	1.126	1.284

Ket:

- Asumsi: Pembahasan RJP, pembahasan Banggar tanggal 3 September 2019, dan UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020.
  - Tahun 2020, Tarif Adjustment mulai diberlakukan kembali. RI-900 RTM masuk ke golongan tarif non subsidi.
  - HBA 2020 sesuai dengan harga pasar (tanpa capping), dengan asumsi yang berasal dari Ice newcastle per Agustus 2019
- 2) Tren Pertumbuhan Penjualan per golongan tarif (%), dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Golongan sosial sebesar 8.07 %
    - b) Golongan Rumah Tangga sebesar 5.59 %
    - c) Golongan Bisnis sebesar 5.68 %
    - d) Golongan Industri sebesar 4.95 %
    - e) Golongan Pemerintah sebesar 5.74 %
  - 3) Efisiensi dengan menekan Fuel mix
    - a) Meningkatkan kinerja operasional dan menyempurnakan pengelolaan energi primer
    - b) Menekan fuel mix menjadi 3,76% tahun 2020 dengan mengoptimalkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan
    - c) Mengatur penggunaan biodiesel B30 dengan ketentuan sebagai berikut:
      - PLTD dan PLTMG milik PLN direncanakan menggunakan Biodiesel B30
      - Beberapa PLTG masih menggunakan HSD, dikarenakan secara teknis tidak memungkinkan menggunakan Biodiesel B30
  - 4) Struktur Tarif, Subsidi dan Pengembangan Kendaraan Listrik
    - a) Mengupayakan diberlakukan tarif adjustment yang dapat memenuhi revenue requirement untuk kegiatan operasi dan investasi
    - b) Melanjutkan upaya pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan
    - c) Melanjutkan inisiatif pengembangan smart grid dan infrastruktur kendaraan listrik (charging station)

- 5) Realisasi Penambahan Pembangkit, transmisi dan GI Tahun 2014 – Real Oktober 2019 dan Rencana 2020

Penambahan 2014-2019		
Pembangkit	Transmisi	Gardu Induk
13,609 MW	21,074 Kms	69,720 MVA

- 6) Penambahan Pelanggan dan Pengutan Infrastruktur Distribusi 2020  
Total Holding:
- Pelanggan sebesar 3,950,454
  - Daya Tersambung sebesar 8,870 MVA
  - JTM sebesar 19,523 kms
  - JTR sebesar 18,716 kms
  - Gardu sebesar 3,889,154 KVA
- c. Laporan PLN terkait Tindak Lanjut Pemadaman listrik, Agustus 2019  
Program perbaikan
- 1) Review dan penyempurnaan Defense Scheme dan Teknologi sistem Kelistrikan Jawa – Bali
  - 2) Review dan perbaikan sistem Proteksi
  - 3) Pengamanan ROW jaringan 500 kV, 275 kV dan 150 kV
  - 4) Meningkatkan insfrastruktur dan sistim Crisis Center yang terpadu
  - 5) Meningkatkan Layanan Call Center
  - 6) Meningkatkan Tata Kelola Publikasi.
- d. Rasio Elektrifikasi Nasional per Desember 2018 mencapai 98,30% dan pada September 2019 mencapai 98,86%

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk melakukan kajian dan pendataan secara akurat jumlah pelanggan rumah tangga R1-900 Rumah Tangga Mampu (RTM) dan non-RTM terkait wacana R1-900 RTM masuk ke golongan tarif non subsidi sebagai masukan kepada Pemerintah untuk menanggukhan pencabutan subsidi listrik tahun 2020.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk mengurangi secara signifikan operasional pembangkitan tenaga listrik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan meningkatkan penggunaan pembangkit berbasis energi baru terbarukan agar Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik menjadi lebih rendah.
3. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan *roadmap* progres pembangunan program 35.000 MW per

wilayah yang telah *Commercial Operation Date* (COD), masih konstruksi, yang terkendala dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tahun 2014-2019 pada program tersebut paling lambat tanggal 9 Desember 2019.

4. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan data rasio elektrifikasi per desa dan desa berlistrik/ belum berlistrik versi PLN kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 9 Desember 2019.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI agar pembangunan bendungan air tidak hanya berorientasi pada bidang pertanian tetapi berorientasi juga pada bidang ketenagalistrikan.
6. Komisi VII DPR RI meminta Plt. Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 9 Desember 2019.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.30 WIB

**PLT DIREKTUR UTAMA  
PT PLN (PERSERO)**

**SRIPENI INTEN CAHYANI**

Jakarta, 25 November 2019  
**KETUA RAPAT,**

**SUGENG SUPARWOTO**  
**A-373**